



IMF PUJI KEMAJUAN REFORMASI EKONOMI SRILANKA

Direktur Departemen Asia dan Pasifik Dana Moneter Internasional (IMF) Krishna Srinivasan (kiri) menghadiri konferensi pers di Colombo, Sri Lanka, Senin (15/5). IMF pada Senin memuji kemajuan reformasi ekonomi Sri Lanka.

Hasil Pemilu Turki di Luar Ekspektasi, Jajak Pendapat Survei Disebut *Ngaco*

Secara umum jajak pendapat tidak terlalu dapat diandalkan di Turki.

ANKARA(IM)-Beberapa hari sebelum Turki menuju pemilihan presiden yang paling penting dalam sejarah modernnya, sebagian besar jajak pendapat menunjukkan Presiden Recep Tayyip Erdogan tertinggal di belakang pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu. Namun dalam pemilihan umum pada Minggu (14/5), Erdogan justru lebih unggul dari pesaingnya. Dengan lebih dari 99 persen suara dihitung, pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK), Erdogan telah menerima 49,51 persen suara. Sementara Kilicdaroglu, pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP), telah memperoleh 44,89 persen.

Karena tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan putaran kedua akan dilakukan pada 28 Mei mendatang. Seorang rekan senior dari Institut Washington, Sonar Cagaptay mengatakan, hasil pemilu Turki di luar ekspektasi.

"Erdogan unggul sekitar 3 poin persentase atau lebih, itu mengejutkan," kata Cagaptay, dilaporkan Aljazeera, Senin (15/5).

Dalam survei yang dilakukan pada 6-7 Mei, lembaga survei terkemuka Konda menyatakan, dukungan untuk Kilicdaroglu mencapai 49,3 persen. Sementara dukungan bagi Erdogan mencapai 43,7 persen. Survei lain oleh perusahaan riset politik Gezici menunjukkan Kilicdaroglu unggul 1 poin dari Erdogan dengan 46,9 persen.

Jurnalis Aljazeera, Sinem Koseoglu yang melaporkan dari Istanbul mengatakan, secara umum jajak pendapat tidak terlalu dapat diandalkan di Turki.

"Sebelum pemilihan, banyak lembaga survei yang dikritik dan dituduh menunjukkan afiliasi dengan partai atau pemimpin tertentu. Di satu sisi, (pemilihan) ini menunjukkan kepada kita bahwa lembaga survei dipolitisasi, dan mereka mencoba memengaruhi pemilih," ujar Koseoglu.

Survei tatap muka yang dilakukan pada 10-11 Mei terhadap hampir 4.000 orang oleh agensi Orc memprediksi kemenangan langsung di putaran pertama untuk kandidat CHP dengan dukungan 51,7 persen.

Pada Kamis (11/5) lalu, setelah pemimpin Partai Tanah Air, Muharram Ince, mundur dari pemilihan presiden. Hal ini diharapkan secara luas akan meningkatkan peluang Kilicdaroglu dan Aliansi Bangsa enam partainya.

Salah satu dari sedikit jajak pendapat yang memprediksi kemenangan Erdogan adalah Optimar, yang dilihat oleh banyak orang sebagai lembaga yang condong ke pemerintah.

Dalam jajak pendapat tersebut diperkirakan Erdogan akan memenangkan mayoritas suara langsung sebanyak 50,4 persen.

Sinan Ogan dari Aliansi ATA, yang merupakan kandidat capres menerima 5,17 persen suara. Hal ini mengejutkan para pengamat. Ogan kemungkinan akan memainkan aturan penting dalam putaran kedua karena Erdogan dan Kilicdaroglu akan mencoba untuk mendapatkan suara dari pendukungnya.

Pemilih oposisi menyatakan kekecewaan dan ketidakpercayaan atas perolehan suara Erdogan di putaran pertama. Pemilihan presiden dan parlemen pada Minggu (14/5) menyajikan tantangan terbesar dalam 20 tahun kepemimpinan Erdogan. Dia tidak pernah kalah dalam pemilihan sejak 1994 ketika menjadi wali kota Istanbul.

Pemilihan umum diadakan di tengah krisis biaya hidup yang semakin dalam dan inflasi yang merajalela. Banyak pihak meyakini gempa bumi yang melanda Turki tenggara pada Februari akan mengikis popularitas Erdogan. Sejumlah pihak mengkritisi tanggapan pemerintah terhadap gempa dan kegagalan pemerintahan Erdogan menegakkan peraturan bangunan.

Kritikus Erdogan menuduh kelalaian pemerintah bertanggung jawab atas kematian lebih dari 50.000 orang akibat gempa. Jurnalis Aljazeera, Zeina Khodr yang melaporkan dari Provinsi Gaziantep yang terdampak gempa mengatakan, dukungan untuk aliansi Erdogan di provinsi ini cukup besar.

"Ini (Gaziantep) secara tradisional adalah kubu (Partai AK), di provinsi yang terkena dampak gempa bumi yang parah ini loyalitas masyarakat tidak terguncang," kata Khodr. "Ini kemarahan setelah gempa bumi atas lambatnya respons awal pemerintah. Hingga kini masih ada kemarahan karena rekonstruksi belum dimulai dengan sungguh-sungguh. Tapi Partai AK mempertahankan dukungannya di wilayah tersebut," tambah Khodr.

Sementara itu, pemerintah Rusia berharap dapat memperdalam dan memperluas kemitraannya dengan Turki terlepas dari siapa pun yang memenangkan pemilihan presiden (pilpres) di negara tersebut. Pilpres Turki dipastikan memasuki putaran kedua setelah pejabat Recep Tayyip Erdogan dan lawan utamanya Kemal Kilicdaroglu sama-sama gagal mengamankan 50 persen suara.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan Rusia mengikuti dan memperhatikan perkembangan pilpres dan pemilu parlemen Turki. "Kami menghormati dan akan menghormati pilihan rakyat Turki. Tapi bagaimanapun juga, kami berharap kerja sama kami akan berlanjut, semakin dalam, dan berkembang," ujar Peskov, Selasa (16/5).

Peskov menyoroti semua aspek kerja sama yang saling menguntungkan antara Moskow dan Ankara seperti di bidang energi, pariwisata, perdagangan, pertanian, serta transportasi. Terkait penyelenggaraan pemilu, Peskov meyakini Turki menyelenggarakannya secara jujur dan adil.

"Turki adalah negara demokrasi maju, negara berdaulat yang kuat, yang tentu saja mampu mengadakan pemilihan yang transparan dan demokratis serta mencegah tindakan ilegal apa pun. Kami tidak ragu tentang itu," ucap Peskov. **tom**

"Meskipun Kim Jong Un seumurannya dengan beberapa di antara mereka, mereka harus memanggilingnya ayah, dan itu memiliki arti politis," imbuhnya.

Sejak Oktober tahun lalu, Kim Jong Un banyak muncul di depan umum bersama putrinya, Kim Ju Ae, dalam apa yang diyakini sejumlah pakar sebagai upaya melunakkan citranya dan mungkin mempersiapkan calon pemimpin wanita untuk generasi keempat dinasti Kim. "Tampaknya itu menjadi upaya persiapan untuk menjadikan dirinya sebagai bapak dari rakyat," cetus warga setempat kepada RFA. **ans**

Sebuah Penginapan Terbakar di Selandia Baru, 6 Orang Tewas dan 11 Masih Hilang

WELLINGTON(IM) - Kebakaran di sebuah penginapan di Selandia Baru menewaskan setidaknya enam orang pada Selasa, (16/5) dan para pejabat mengatakan mereka yakin jumlah korban bisa bertambah dengan 11 orang masih hilang.

Kebakaran terjadi di lantai atas Loafers Lodge di lingkungan Wellington di Newtown tepat setelah tengah malam, kata polisi. Sejauh ini penyebab kebakaran belum diketahui.

"Ini adalah kebakaran sekali dalam satu dekade untuk Wellington. Ini adalah mimpi terburuk bagi kami," kata Komandan Manajer Distrik Nick Pyatt dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.

"Ini adalah peristiwa tragis bagi semua yang terlibat. Belasungkawa tulus saya sampaikan kepada orang-orang terkasih dari mereka yang kehilangan nyawa," tambahnya.

Penghuni Loafers Lodge, Tala Sili, mengatakan dia melihat asap masuk ke bawah pintunya dan membukanya, melihat lorong penuh asap. Dia memutuskan untuk melompat keluar jendela ke atap dua lantai di bawah.

"Itu menakutkan, sangat menakutkan, tapi saya tahu saya harus melompat keluar jendela atau terbakar di dalam gedung," katanya kepada Radio Selandia Baru milik negara. Petugas pemadam kebakaran berada di lokasi karena masih ada kebakaran kecil di dalam gedung, dan penilaian struktural dan risiko sedang dilakukan. Investigasi tentang apa yang menyebabkan kebakaran sedang dilakukan, menurut Fire and Emergency New Zealand (FENZ).

Polisi mengatakan mereka tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut sampai gedung dengan 92 kamar itu aman untuk dimasuki, dan masih ada risiko atapnya akan runtuh. Perdana Menteri Chris Hipkins mengatakan kepada acara televisi sarapan AM bahwa enam orang tewas dan polisi memperkirakan jumlah korban tewas akan kurang dari 10 orang. Hipkins mengunjungi situs tersebut dan berbicara dengan penyedia layanan darurat. "Ini benar-benar tragedi dan ini adalah situasi yang mengerikan," kata Hipkins kepada media setelah kunjungan tersebut.

"Seiring waktu, tentu saja akan ada sejumlah penyelidikan tentang apa yang telah terjadi dan mengapa itu terjadi, tetapi untuk saat ini, fokusnya harus pada penanganan situasi," tambahnya. **tom**

Malaysia Usulkan UU Baru Terkait Kepemilikan Narkoba

KUALA LUMPUR(IM)-Malaysia mengusulkan undang-undang untuk mendekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan obat-obatan terlarang dalam jumlah kecil. Ini adalah langkah terbaru dari serangkaian reformasi peradilan pidana yang dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Malaysia memiliki hukuman keras untuk kejahatan narkoba. Di bawah reformasi yang disahkan bulan lalu, hukuman mati untuk perdagangan narkoba tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi wajib. Hakim diizinkan untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman

mati kepada pelaku atau tidak. Di bawah undang-undang baru yang diusulkan, mereka yang ditemukan memiliki narkoba dalam jumlah kecil tidak akan dituntut. Tetapi dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba untuk perawatan.

Di bawah undang-undang baru yang diusulkan, mereka yang ditemukan memiliki narkoba dalam jumlah kecil tidak akan dituntut. Tetapi dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba untuk perawatan.

"Bagi mereka yang ditemukan memiliki narkoba dalam jumlah kecil, baik untuk kepemilikan atau penggunaan, idenya bukan untuk mengang-

gap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terkait narkoba biasa," kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution kepada wartawan.

Proposal tentang undang-undang baru itu diharapkan dapat diajukan ke kabinet pada Juli. Saifuddin mengatakan, jika disetujui, rancangan undang-undang akan diajukan ke parlemen pada tahun ini.

Malaysia dianggap sebagai titik transit utama untuk narkotika ilegal. Polisi mengatakan hampir 29.000 orang ditangkap pada 2022 karena berbagai pelanggaran narkoba, yang sebagian besar adalah pecandu. **ans**



KOSTUM TRADISIONAL RUMANIA

Para wanita berswafoto dalam acara yang menampilkan kostum tradisional Rumania di pusat kota Bucharest, Rumania, Minggu (14/5).

Warga Korut Diwajibkan Panggil Kim Jong Un 'Ayah Terhormat'

PYONGYANG (IM)

- Warga Korea Utara (Korut) kini diwajibkan memanggil pemimpin mereka, Kim Jong Un, sebagai 'Ayah yang Terhormat'. Aturan itu menandai kekesalan bahkan kebencian di kalangan kaum muda Korut yang menganggap Kim Jong Un seumurannya dengan mereka dan tidak layak mendapatkan kehormatan seperti itu.

Seperti dilansir Radio Free Asia (RFA), Selasa (16/5), publik Korut menilai pemujaan semacam itu seperti tidak memahami situasi, mengingat adanya kelaparan meluas yang dihadapi banyak warga negara terisolasi itu.

Kim Jong Un yang berusia 38 tahun ini tampaknya berupaya mengabdikan kultus kepribadian seperti mendiang ayahnya, Kim Jong Il, dan mendiang kakeknya, Kim Il Sung, yang sama-sama dipanggil dengan sebutan itu, namun pada usia yang lebih tua.

Dituturkan sejumlah warga Korut, yang tidak disebut namanya karena alasan keamanan, kepada RFA bahwa keputusan itu jelas terlihat dalam materi pendidikan baru yang didistribusikan untuk organisasi-organisasi pemuda yang wajib dihadiri oleh warga Korut berusia 35 tahun atau lebih muda.

"Sampai sekarang, otoritas setempat tengah mengatakan (di media) bahwa hati rakyat mengagumi dan mematuhi Sekretaris Jenderal seperti mereka mengikuti dan mematuhi ayah mereka sendiri," tutur seorang warga Provinsi Hamgyong Utara kepada RFA.

"Menurut kuliah pendidikan bulan ini, anak muda yang berusia antara 14 tahun hingga 35 tahun sekarang harus memanggil Sekretaris Jenderal sebagai ayah mereka, meskipun usianya diperkirakan 38 tahun," ungkap warga Korut itu.

"Meskipun Kim Jong Un seumurannya dengan beberapa di antara mereka, mereka harus memanggilingnya ayah, dan itu memiliki arti politis," imbuhnya.

Banyak warga Korut yang menganggap Kim Jong Un masih muda dan tidak berpengalaman, jika dibandingkan dengan dua pemimpin sebelumnya. Mereka menilai gelar baru itu terkesan tidak pantas dan bahkan terkesan sebagai pemujaan.

Pendiri Korut, Kim Il Sung, mulai menggunakan gelar itu tahun 1967 silam, ketika usianya menginjak 55 tahun. Kemudian tahun 1992, warga Korut dengan usia termuda mulai memanggilingnya 'Kakek'.

Setelah kematiannya, Kim Jong Il, yang menggantikannya mulai menggunakan gelar 'Ayah yang Terhormat' pada usia 53 tahun. Gelar itu digunakan hingga ayah Kim Jong Un itu meninggal tahun 2011 lalu.

Di sisi lain, menurut seorang warga di Provinsi Ryanggang, langkah itu memicu kemarahan publik Korut karena dianggap sebagai langkah yang tidak bijaksana di tengah kelaparan yang meluas di seluruh negara tersebut.

"Media memuji dia sebagai pemimpin yang luar biasa dan canggih, 'seorang patriot yang tidak kenal takut yang menyebarkan martabat dan kekuatan (negara kita) ke dunia', dan sekarang kita memanggilingnya 'Ayah'. Kebencian di kalangan muda semakin meningkat," tutur warga setempat itu.

Gelar terbaru untuk Kim Jong Un itu juga dinilai sebagai bagian dari upaya propaganda lebih luas yang mencakup lebih banyak visibilitas publik untuk penguasa dan keluarganya.

Sejak Oktober tahun lalu, Kim Jong Un banyak muncul di depan umum bersama putrinya, Kim Ju Ae, dalam apa yang diyakini sejumlah pakar sebagai upaya melunakkan citranya dan mungkin mempersiapkan calon pemimpin wanita untuk generasi keempat dinasti Kim. "Tampaknya itu menjadi upaya persiapan untuk menjadikan dirinya sebagai bapak dari rakyat," cetus warga setempat kepada RFA. **ans**

Sementara itu, pada pertengahan Maret, sainsan lama Iran dan Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka berencana untuk memulihkan hubungan diplomatik, yang telah mereka putus pada 2016.

Pembicaraan dan kesepakatan selanjutnya antara dua kekuatan regional ditengahi oleh China, dengan Amerika Serikat (AS) secara mencolok absen dari perselingkuhan tersebut.

Fakta bahwa Beijing berhasil membuat kedua saingan itu berbicara dan mencapai kesepakatan digambarkan sebagai kemenangan besar bagi diplomasi China.

Riyadh juga terlibat dalam negosiasi dengan pemberontak Syiah Houthi di Yaman bulan lalu, sehingga menimbulkan harapan bahwa konflik berdarah yang telah berkecamuk sejak 2015 itu akan segera berakhir.

Perang di Yaman secara luas dipandang sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Akhir bulan lalu, surat kabar Tiongkok People's Daily melaporkan bahwa Presiden Xi Jinping secara pribadi memainkan peran penting dalam membujuk Riyadh dan Teheran untuk menormalkan hubungan. **tom**

Hubungan antara Kairo dan Teheran terputus pada 1980 setelah Revolusi Islam